



Peran Masyarakat Terhadap Perlindungan dan Pengembangan Kawasan Taman Nasional Baluran, Situbondo, Jawa Timur

The Role of the Community in the Protection and Development of the Baluran National Park Area, Situbondo, East Java

Khansa Salma Akifah¹, Siti Maesaroh¹, Anisa Kirana Dini Ary¹, Sabrina Zahrani Safitri¹, Afrillah Suaibah Lubis¹, Evi Mulyah^{1*}, Meiry Fadillah Noor¹

¹UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

*Corresponding Author: evimulyah@uinjkt.ac.id

Artikel Penelitian

Article History:

Received: 8 Sept, 2024

Revised: 23 Oct, 2024

Accepted: 21 Nov, 2024

Kata Kunci:

Baluran;
Konservasi Lingkungan;
Perlindungan;
Pengembangan;
Peran Masyarakat

Keywords:

Baluran;
Environmental
Conservation;
Protection;
Development;
Role of Society

DOI: [10.56338/jks.v7i12.6048](https://doi.org/10.56338/jks.v7i12.6048)

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran aktif masyarakat dalam upaya perlindungan dan pengembangan Kawasan Taman Nasional Baluran dan mengidentifikasi tugas dan kewajiban berbagai kelompok masyarakat dengan berbeda dengan perlindungan dan pengembangan kawasan Taman Nasional Baluran. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan analisis dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat memiliki peran yang signifikan dalam perlindungan dan pengembangan kawasan Taman Nasional Baluran, antara lain menjaga keseimbangan ekosistem, memonitor kegiatan ilegal, dan mendukung program konservasi yang dilakukan pemerintah, dan turut andil dalam kegiatan pengembangan kawasan mulai dari sarana prasarana yang tersedia di kawasan Taman Nasional Baluran. Namun demikian, tantangan seperti minimnya Sumber Daya Manusia di sekitar kawasan dan konflik kepentingan masih menjadi hambatan utama dalam optimalisasi peran masyarakat.

ABSTRACT

This research aims to analyze the active role of the community in efforts to protect and develop the Baluran National Park area and identify the duties and obligations of various community groups in different ways to protect and develop the Baluran National Park area. The method used is a qualitative approach with data collection techniques through in-depth interviews, participatory observation and document analysis. The results of the research show that the community has a significant role in protecting and developing the Baluran National Park area, including maintaining the balance of the ecosystem, monitoring illegal activities, and supporting conservation programs carried out by the government, and taking part in area development activities starting from the infrastructure available in Baluran National Park area. However, challenges such as the lack of human resources in the area and conflicts of interest are still the main obstacles in optimizing the role of the community.

PENDAHULUAN

Upaya terhadap perlindungan tumbuhan, satwa dan ekosistem dalam suatu kawasan yang berpotensi ditindaklanjuti dengan adanya penetapan beberapa kawasan konservasi yang dikenal dengan Taman Nasional, salah satunya Taman Nasional Baluran (Garsetiasih, Sawitri, and Rianti, 2016). Taman Nasional Baluran merupakan kawasan konservasi yang terletak di Kecamatan Banyuputih, Kabupaten Situbondo, Jawa Timur. Penetapan sebagai kawasan konservasi didasarkan pada Surat Keputusan Pemerintah Hindia Belanda Nomor 9 Tahun 1937 yang bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap berbagai jenis satwa liar agar terhindar dari kepunahan (Sawitri dan Takandjandji 2023). Taman Nasional Baluran merupakan perwakilan ekosistem hutan yang spesifik kering di Pulau Jawa (Wulandari and Rohmah, 2023).

Luas kawasan Taman Nasional sebesar 25.000 ha yang terbagi menjadi beberapa zona, diantaranya; zona inti 12.000 ha, zona rimba yang terdiri atas zona perairan 1.063 ha dan zona daratan 4.754 ha, zona pemanfaatan khusus 5.780 ha, zona pemanfaatan intensif 800 ha, dan zona rehabilitasi 783 ha. Daerah konservasi baluran memiliki tipe ekosistem yang cukup beragam, diantaranya hutan pantai, savana, evergreen, mangrove, dan hutan (musim dataran rendah dan pegunungan) (Istomo and Hartarto, 2019). Taman Nasional Baluran merupakan salah satu daerah konservasi yang memiliki berbagai spesies mamalia, burung, kupu-kupu, dan ikan. Zonasi merupakan suatu proses pengaturan ruang di dalam Taman Nasional menjadi zona yang mencakup kegiatan-kegiatan di Taman Nasional (Fandreawan and Purwaningtyas, 2024)

Asas penting dalam hal pengelolaan, perlindungan, maupun pemanfaatan kawasan konservasi sebagaimana tertuang dalam UU No. 5 Tahun 1990 yang membahas tentang Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Hanim, Chalim, and Hafidz, 2020). Pemerintah Indonesia sudah sangat peduli terhadap kondisi lingkungan dan kekayaan sumber daya hayati, terutama upaya konservasi yang sudah dilakukan dari tahun 1974 yang dibuktikan dengan pembentukan Direktorat Perlindungan dan Pengawetan Alam yang dinaungi oleh Departemen Pertanian.

Perlindungan terhadap kawasan konservasi Taman Nasional Baluran menjadi salah satu upaya untuk menjaga dan melindungi ekosistem beserta tumbuhan maupun satwa liar yang hidup di dalam kawasan tersebut. Aspek pemanfaatan juga diterapkan dalam kawasan konservasi yang menitikberatkan pada penerimaan manfaat secara nyata kepada masyarakat. Salah satunya dengan memberikan keleluasaan kepada masyarakat untuk memanfaatkan potensi kawasan taman nasional. Hal ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 28 Tahun 2011 yang membahas tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam pasal 1, yang mencakup keberlangsungan fungsi dan pemanfaatannya pada potensi tumbuhan maupun satwa yang dimiliki (Soekmadi, 2003).

Perlindungan dan pemanfaatan yang merujuk pada pengembangan kawasan Taman Nasional sangat berkaitan dengan keikutsertaan masyarakat sekitar. Hal ini menjadi bukti bahwa masyarakat termasuk ke dalam komponen yang sangat penting dalam hal perlindungan, pengelolaan dan pemanfaatan kawasan konservasi. Proses pengelolaan yang dilakukan oleh masyarakat akan dihubungkan dengan berbagai aspek ekonomi yang meliputi berbagai interaksinya sehingga dapat dipastikan bahwa pengelolaan yang dilakukan termasuk kategori baik yang tidak merusak (Garjita, I. Susilowati, 2014)

Putro *et.al* (2012) menyebutkan bahwa kondisi ekonomi yang terjadi secara nyata di masyarakat justru masih bernilai rendah sehingga menimbulkan masalah antara pihak masyarakat dengan pengelola kawasan Taman Nasional yang memiliki tujuan sebagai upaya dalam pemenuhan kebutuhan hidupnya. Selain ekonomi, kondisi sosial budaya yang melekat juga akan berhubungan langsung dalam proses pengelolaan maupun perlindungan kawasan taman nasional yang dilakukan oleh masyarakat setempat (Narsuka, Setiawan, and Cangkringan, 2016).

Masyarakat yang ikut serta berperan dalam mengelola dan melindungi kawasan taman nasional mengacu pada tindakan secara terbuka, baik dari masyarakat maupun pihak pengelola kawasan taman nasional (Panuju, 1999). Pentingnya peran serta masyarakat dilihat pada fungsinya, yaitu sebagai alat untuk mendapatkan informasi terkait kondisi lingkungan dan kebutuhan masyarakat dan keterlibatan masyarakat dalam kegiatan pembangunan kawasan (Irawan, 2003).

Peran masyarakat dalam tingkatannya dalam aspek pembangunan dapat terbagi menjadi beberapa kategori, diantaranya tanpa adanya partisipasi, masyarakat sebagai penerima, dan adanya

kekuasaan atas masyarakat. Selain itu, disebutkan juga bahwa peran masyarakat dalam hal perlindungan, pengelolaan, pengawetan, dan pemanfaatan akan dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Usia, pendidikan terakhir, jenis pekerjaan, rentang penghasilan, domisili, serta hubungannya dengan lingkungan sekitar termasuk ke dalam faktor internal, sedangkan faktor eksternal bersumber pada pihak-pihak yang berpengaruh pada kegiatan perlindungan dan pengelolaan taman nasional, seperti pemerintah daerah, LSM, dan sebagainya (Sadono, 2013).

Masyarakat di sekitar kawasan taman nasional dapat dikatakan memiliki keterbatasan, baik dalam pengelolaan, perlindungan, pemanfaatan serta pengembangan sehingga pemahaman dan pengetahuan masyarakat serta perannya dalam proses konservasi kawasan perlu untuk digali lebih lanjut.

Perlindungan dan pengembangan kawasan Taman Nasional Baluran turut melibatkan peranan masyarakat. Berdasarkan uraian diatas, artikel ditulis dengan beberapa tujuan, diantaranya menganalisis peran aktif masyarakat dalam upaya perlindungan dan pengembangan terhadap kawasan Taman Nasional Baluran dan mengidentifikasi tugas dan kewajiban berbagai kelompok masyarakat dengan berbeda dengan perlindungan dan pengembangan kawasan Taman Nasional Baluran. Tujuan tersebut diharapkan memberikan gambaran keterlibatan masyarakat terhadap perlindungan dan pengembangan kawasan Taman Nasional Baluran.

METODE

Penelitian ini dilaksanakan di Kawasan Taman Nasional Baluran, Kabupaten Situbondo, Jawa Timur dari tanggal 27 – 30 Mei 2024. Penelitian dilakukan dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Kim, Sefcik and Bradway (2017) menyebutkan bahwa pendekatan deskriptif kualitatif lebih berfokus pada pertanyaan yang ditujukan secara langsung kepada informan atau narasumber sehingga menghasilkan data yang lengkap dan bersifat faktual.

Sampel yang digunakan merupakan masyarakat sekitar Kawasan Taman Nasional Baluran dengan berbagai latar belakang yang berbeda. Untuk penelitian ini sampel yang diambil berjumlah 8 orang. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara terbuka. Lembar wawancara yang digunakan berfokus pada aspek perlindungan dan pengembangan di Kawasan Taman Nasional Baluran. Data yang diperoleh dianalisis dalam bentuk deskripsi naratif yang bersumber pada transkrip wawancara dengan penjelasan yang informatif.

HASIL

Hasil data yang didapatkan dari 8 sampel masyarakat di sekitar Taman Nasional Baluran dengan 7 peran masyarakat yang disajikan dalam deskripsi naratif. Tujuan dilakukannya penelitian, yaitu memberikan gambaran peranan masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan kawasan Taman Nasional Baluran, Situbondo, Jawa Timur. Data hasil wawancara mengenai peranan masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan kawasan Taman Nasional Baluran, Situbondo, Jawa Timur.

Tabel 1. Peran masyarakat terhadap perlindungan kawasan Taman Nasional Baluran, Situbondo, Jawa Timur

No	Jenis Pekerjaan	Tugas & Kewajiban	Pembekalan Alat	Masalah yang ditemukan	Sistem pelaporan	Hambatan yang ditemukan
1	Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K)	Mengendalikan kebakaran kawasan Taman Nasional Baluran dan memberikan	Kartu identitas, seragam harian KLHK, seragam manggala agni, topi, senter, borgol, pisau	Ulah manusia sebagai pemicu kebakaran.	Laporan tiap kejadian, laporan harian, laporan mingguan	Koordinasi, sinyal dan kendaraan operasional.

	Manggala Agni	penyuluhan.	komando, pentungan, pompa punggung, parang dan pemukul api.		dan laporan bulanan.	
2	Pengendali Ekosistem Hutan (PEH)	Mempertahankan habitat, ekosistem dan populasi satwa & tumbuhan di dalam kawasan dari gangguan manusia, perubahan iklim serta faktor-faktor lain.	Tidak ada.	Gangguan hutan oleh manusia diantaranya illegal logging, perburuan satwa, kebakaran hutan serta pembangunan.	Laporan tiap kejadian, laporan harian, laporan mingguan dan laporan bulanan.	Penerapan kebijakan, teknis di lapangan, perubahan iklim maupun perbedaan sudut pandang dalam menilai suatu permasalahan yang perlu diselesaikan.
3	Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) Wakil SEKJEN	3P, yaitu Perlindungan, pengawetan dan pemanfaatan pada area kawasan Taman Nasional Baluran.	Seragam dan GPS	Rasa ketergantungan masyarakat terhadap Taman Nasional Baluran.	Laporan tiap kejadian, laporan harian, laporan mingguan dan laporan bulanan.	Titik absensi hanya di tempat tertentu saja dengan batasan waktu tertentu.
4	Koordinator Polisi Hutan	Menyusun strategi perlindungan kawasan Taman Nasional Baluran, mengkoordinasikan dan melakukan pengawasan terhadap anggota polisi hutan terutama pada musim kemarau dalam melakukan pemantauan dengan tujuan melindungi Taman Nasional.	Pengukur cuaca atau iklim dan seragam.	Tidak ada.	Laporan tiap kejadian, laporan harian, laporan mingguan dan laporan bulanan.	Kurangnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat terkait pengelolaan & pemanfaatan Taman Nasional Baluran sehingga tidak jarang dimanfaatkan oleh oknum tertentu.
5	Masyarakat Binaan	Berkomitmen untuk memberikan dan mengajak masyarakat desa, membantu	Lampu sorot, borgol, pompa punggung.	Tidak Ada.	Membentuk kelompok masyarakat binaan dan melaporkan ke Polisi	Kurangnya pengetahuan dan pemahaman Masyarakat Binaan dalam

		mencari informasi terkait pelanggar, pengamanan kawasan dan pengunjung Taman Nasional Baluran.			Hutan, memberikan informasi ke petugas terkait pelanggar (jumlah orang, posisi, dan kendaraan yang dipakai).	menggunakan alat sederhana dalam melawan pelanggar.
6	Masyarakat Peduli Api (MPA)	Memadamkan api dan selalu siap sedia untuk pemadaman api serta patroli hutan dalam mengindikasi kebakaran	Pompa punggung, sepatu, shooter (pemadam api), celana safety	Pemantauan daerah rawan kebakaran.	Melakukan pelaporan luas dan lebar dari tempat kebakaran di dalam buku laporan atau melalui aplikasi yang selanjutnya dilaporkan ke Polisi Hutan yang bertugas.	Hambatan terjadi jika kebakaran di lereng gunung, jika api terlalu besar maka diperlukan untuk membuat skat bakar sekitar 2 meter untuk memadamkan api tanpa air serta alat kurang memadai dan kurangnya anggota yang sigap menangani kebakaran

Peran Masyarakat Terhadap Perlindungan Kawasan Taman Nasional Baluran, Situbondo, Jawa Timur

Berdasarkan Tabel 1, dapat diketahui bahwa responden dengan jenis pekerjaan yang berbeda mempunyai kesamaan dalam upaya melindungi dan melakukan pengembangan kawasan Taman Nasional Baluran. Masyarakat sekitar memiliki potensi besar dalam keterlibatan pengelolaan dan pemanfaatan Taman Nasional Baluran. Tabel tersebut menunjukkan kontribusi signifikansi dari masyarakat, mulai dari menjaga atau melindungi kawasan, membantu pemadaman api saat terjadinya kebakaran, pemantauan ekosistem atau hanya dalam bentuk pengaduan kejadian dalam kawasan Taman Nasional Baluran. Setiap jenis pekerjaan memiliki perbekalan alat sesuai dengan tantangan ataupun risiko yang dihadapi dengan sistem pelaporan yang terstruktur guna memastikan efisiensi koordinasi.

Tabel 1. menguraikan peranan berbagai kelompok masyarakat dalam melindungi kawasan Taman Nasional Baluran. Pada tabel ditunjukkan P3K Manggala Agni yang memiliki tugas pokok dalam pengendalian kebakaran kawasan Taman Nasional Baluran, juga turut dalam mengendalikan ekosistem serta menjaga dan melindungi kawasan Taman nasional Baluran sehingga yang demikian mengurangi perburuan dan eksploitasi alam secara berlebihan. Selama bertugas, P3K manggala agni dibekali beberapa peralatan, seperti senter, borgol, pisau komando, pentungan, pompa punggung hingga pemukul api. Sementara, patroli yang dilakukan harian diberikan kelengkapan berupa kartu anggota

sebagai tanda pengenal, seragam Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) beserta seragam dan topi khusus manggala agni.

Kebakaran hutan yang terjadi kebanyakan dipicu oleh ulah manusia. Kebakaran dapat dideteksi dengan pembagian 3 musim, dimana pada bulan mei-september merupakan pergantian musim dari musim hujan ke musim kemarau, bulan september-oktober kawasan Taman nasional Baluran mulai memasuki musim kemarau hingga pada puncaknya terjadi pada bulan november-desember. Selain dari pembagian musim, kegiatan patroli harian dengan mengelilingi kawasan atau mengecek melalui mercusuar serta pengaduan informasi dari masyarakat juga mengindikasikan terjadinya kebakaran pada kawasan Taman Nasional Baluran.

Hambatan yang dialami selama bertugas sebagai P3K manggala agni, diantaranya adalah keterbatasan koordinasi ketika terjadinya kebakaran karena kondisi sinyal yang kurang baik serta keterbatasan dalam kendaraan operasional. Berdasarkan beberapa hambatan dan tantangan pekerjaan tersebut, P3K manggala agni dibekali beberapa pelatihan, diantaranya pendidikan dan pelatihan pelayanan pemadam kebakaran, pencarian dan pertolongan hingga Pendidikan dan Pelatihan Satuan Pengamanan (DIKLAT SATPAM).

MPA atau Masyarakat Peduli Api memiliki tugas pokok, yaitu memadamkan api dan selalu siap sedia untuk pemadaman api serta patroli hutan dalam mengindikasikan kebakaran. Identifikasi masalah munculnya api melalui menara pantau yang terdapat di Savana Bekol dan Balai Taman Nasional Baluran. Pembekalan alat utama yang digunakan MPA dalam menjalankan tugasnya, yaitu pompa punggung, sepatu, shooter (pemadam api), dan celana safety. Masalah yang seringkali ditemukan selama bertugas, yaitu pemantauan daerah rawan kebakaran.

Seorang MPA mengikuti pelatihan khusus, yaitu pelatihan menanggulangi api yang dapat menunjang pekerjaan dengan tugas dan kewajiban Masyarakat Peduli Api. Hambatan yang dialami selama menjadi anggota MPA (Masyarakat Peduli Api), yaitu jika terjadi kebakaran di lereng gunung dengan intensitas api yang cukup besar. Seorang MPA harus bertindak untuk membuat sekat bakar sekitar 2 meter yang terbuat dari sapu atau daun kering untuk memadamkan api tanpa menggunakan air. Selain itu, hambatan yang dijumpai seorang MPA, yaitu kurangnya alat yang memadai serta anggota yang sigap menangani kebakaran.

PEH yang memiliki tugas pokok yakni mempertahankan habitat, memelihara ekosistem & populasi tumbuhan dan satwa serta melindungi kawasan Taman Nasional Baluran, baik dari ulah manusia, perubahan iklim serta faktor lainnya. Dalam pelaksanaan tugasnya, PEH diberikan kartu anggota sebagai tanda pengenal dan seragam, tidak terdapat peralatan khusus selama bertugas. Meski demikian, masalah yang kerap kali ditemukan adalah gangguan hutan oleh manusia yang merusak kawasan, pembangunan tak terelakkan serta aktivitas manusia lainnya yang memanfaatkan sumber daya alam dalam kawasan Taman Nasional Baluran.

Masalah tersebut dapat dideteksi oleh beberapa hal, diantaranya dari hasil patroli rutin, adanya pelaporan masyarakat sekitar Taman Nasional Baluran, hasil kegiatan inventarisasi, monitoring lapangan serta hasil evaluasi kegiatan. Demikian dengan waktu penanganan yang cenderung berbeda-beda, tergantung pada beratnya permasalahan dan kapasitas penyelesaiannya, dimana terbagi atas 2 kategori besar, yaitu masalah masih dapat ditangani pada level balai atau seksi dan masalah harus ditangani oleh pimpinan atau jajaran kementerian karena berkaitan dengan kebijakan di tingkat pusat.

Hambatan yang dialami selama bertugas sebagai PEH dapat berupa penerapan kebijakan, teknis di lapangan, perubahan iklim maupun perbedaan sudut pandang dalam menilai suatu permasalahan yang perlu diselesaikan. Berdasarkan beberapa hambatan dan tantangan pekerjaan tersebut, PEH dibekali beberapa pelatihan, diantaranya Pendidikan dan Pelatihan PEH dengan Tingkat Ahli Angkatan I, *inhouse training* pengelolaan satwa liar di Taman Nasional Baluran, DIKLAT analisis resiko, deteksi dini dan langkah cepat penanggulangan tumbuhan asing invasif di ekosistem hutan, *inhouse training* penulisan karya ilmiah bidang perlindungan dan pengendalian ekosistem hutan, pelatihan perencanaan kelola kawasan konservasi dan Bimbingan Teknis (BIMTEK) pemolaan dan penataan kawasan konservasi.

P3K yang berperan sebagai wakil Sekretaris Jenderal dengan tugas pokok berupa 3P atau perlindungan, pengawetan dan pemanfaatan, yang demikian mencakup perlindungan terhadap perburuan liar, pemantauan patroli aktif hingga pemberdayaan masyarakat adalah bagian dari upaya perlindungan kawasan Taman Nasional Baluran. Perlindungan mengarah pada pemantauan, penyisihan

serta pendeteksi khususnya area Savana Bekol, Taman Nasional Baluran, sementara pengawetan mengarah pada pemantauan & mensuplai ketersediaan air dan kubangan satwa hingga pengawetan suaka satwa banteng. Pemanfaatan mengarah pada pemberian pelayanan pengunjung. Dalam melaksanakan tugas, P3K wakil SEKJEN dibekali dengan baju identitas dan *Global Positioning System* (GPS).

Rasa ketergantungan masyarakat terhadap Taman Nasional Baluran merupakan salah satu masalah. Sedangkan, hambatan yang dialami selama bertugas sebagai P3K wakil SEKJEN, diantaranya adalah titik absensi hanya di tempat tertentu saja dengan batasan waktu tertentu sehingga menyulitkan beberapa masyarakat yang bertugas. Dengan beberapa hambatan dan tantangan pekerjaan tersebut, P3K wakil SEKJEN, dibekali beberapa pelatihan, seperti pelatihan pembuatan peta *Geographic Information System* (GIS), pelatihan pencegahan hutan (KARHUTLA), pelatihan pengoperasian *stott book* (pohon silsilah), pelatihan *Japan International Cooperation Agency* (JICA), pelatihan *rescue*, pelatihan menembak serta pelatihan pengoperasian tenaga surya.

Koordinator POLHUT atau polisi hutan memiliki tugas pokok yakni menyusun strategi perlindungan mengkoordinasikan dan melakukan pengawasan terhadap anggota polisi hutan terutama pada musim kemarau dalam melakukan pemantauan dengan tujuan melindungi kawasan Taman nasional Baluran. Selama bertugas sebagai koordinator POLHUT, dibekali beberapa peralatan, seperti beragam pengukur cuaca atau iklim dan seragam.

Hambatan yang dialami selama bertugas sebagai koordinator POLHUT, adalah Kurangnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat terkait pengelolaan & pemanfaatan Taman Nasional Baluran sehingga tidak jarang dimanfaatkan oleh oknum tertentu. Dengan beberapa hambatan dan tantangan pekerjaan tersebut, koordinator POLHUT dibekali beberapa pelatihan, diantaranya ialah pelatihan menembak, pelatihan *intelligent*, pelatihan selam hingga pelatihan yang terfokus pada pemadaman kebakaran.

Masyarakat binaan juga memiliki peranan penting dalam keterlibatan menjaga atau melindungi kawasan Taman Nasional Baluran. Masyarakat binaan turut melindungi kawasan Taman Nasional Baluran dengan berkomitmen untuk memberikan dan mengajak masyarakat desa di sekitar Taman Nasional Baluran dalam melakukan upaya konservasi, seperti tidak membuang sampah sembarangan atau memberikan informasi adanya pelanggar kepada polisi hutan yang berwenang. Selain itu, masyarakat binaan juga turut melakukan pengamanan kawasan & pengunjung, melaporkan dana dan alat fisik yang digunakan selama bertugas hingga turut membantu mengatasi masalah keamanan sekitar Taman Nasional Baluran melalui saran. Masyarakat binaan dibekali beberapa peralatan yang telah disediakan, seperti lampu sorot, borgol hingga pompa punggung.

Hambatan yang dialami selama menjadi masyarakat binaan adalah kurangnya pengetahuan masyarakat binaan dalam menggunakan alat, baik sederhana ataupun modern dalam melawan pelanggar. Dengan beberapa hambatan dan tantangan tersebut masyarakat binaan dibekali beberapa pelatihan, diantaranya ialah pelatihan pengamanan Taman Nasional Baluran, khususnya di Pantai Bama, pelatihan pemandu wisata, baik wisatawan lokal maupun luar negeri dan pelatihan bimbingan visitor.

P3K Penyuluh bertugas untuk melakukan penyuluhan masyarakat, mendampingi masyarakat, dan sebagai fasilitator di kawasan Taman Nasional Baluran. Pembekalan alat khusus meliputi lampu sorot, borgol, pompa punggung, dan seragam khusus penyuluh. Pelatihan khusus selama bekerja sebagai seorang penyuluh, antara lain pelatihan *Jawa-Wide Leopard Survey* (JWLS), pelatihan kebakaran hutan, dan pelatihan *Search and Rescue* (SAR). Hambatan yang sering kali dijumpai, yaitu konflik masyarakat dengan hewan, seperti peristiwa hewan liar di Taman Nasional Baluran melukai masyarakat dan menyerang masyarakat.

Taman Nasional Baluran memiliki 2 sistem pelaporan. Masyarakat yang bertugas dalam kawasan Taman Nasional Baluran diharuskan mengisi laporan harian, yang nantinya akan direkap menjadi laporan mingguan hingga puncaknya pada laporan bulanan. Laporan tersebut dilakukan sebagai salah satu bentuk pemantauan kegiatan atau kejadian di kawasan Taman Nasional Baluran. Selain itu, diadakan pula laporan tiap kejadian, laporan tersebut dibuat setiap terjadinya sesuatu, baik kebakaran, perburuan atau eksploitasi hasil alam di kawasan Taman Nasional Baluran.

Kejadian tersebut dilaporkan melalui aplikasi *memento* untuk diproses ke seksi, lalu diproses ke pimpinan, namun apabila kejadian tersebut dalam kondisi mendesak, maka dapat langsung melapor kepada seksi atau Kepala Balai untuk segera ditindaklanjuti. Rekap pelaporan tersebut dilaksanakan secara berjenjang, mulai dari laporan lapangan melalui Kepala resort Pengelolaan Taman Nasional (RPTN), kemudian kepada Kepala Seksi Pengelolaan Taman Nasional (SPTN) hingga Kepala Balai.

Laporan tiap kejadian pada aplikasi *memento* biasanya meliputi, jam, tanggal, bulan, titik koordinat tempat kejadian, yang demikian juga berlaku untuk kejadian selain kebakaran, seperti perburuan atau pencurian hasil alam dengan sistem pelaporan yang meliputi foto, nama tersangka, alamat tersangka, nama petugas, titik koordinat tempat kejadian dan beberapa hal detail lainnya.

Masyarakat sekitar, khususnya masyarakat binaan juga memiliki laporan adanya tindak penyalahgunaan yang akan diberikan kepada polisi hutan dan petugas terkait dengan jumlah orang, posisi hingga kendaraan yang dipakai. Selain itu, masyarakat juga dapat melaporkannya melalui *call center* yang akan langsung diteruskan kepada Kepala Balai. Informasi yang diberikan tersebut tentunya berperan penting dalam melindungi kawasan Taman Nasional Baluran.

Tabel 2. Peran masyarakat terhadap pengembangan kawasan Taman Nasional Baluran, Situbondo, Jawa Timur

No.	Jenis Pekerjaan	Pengetahuan pengembangan kawasan Taman Nasional Baluran	Kendala pengembangan kawasan Taman Nasional Baluran	Usulan pengembangan kawasan Taman Nasional Baluran	Tindakan pengembangan kawasan Taman Nasional Baluran
1	Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) Manggala Agni	Akses jalan, pembangunan dan desain bangunan.	Kerusakan pembangunan oleh satwa liar dan pemburu.	Perbaiki sinyal.	Membersihkan pohon atau ranting yang menutup akses jalan dan menjaga lingkungan.
2	Pengendali Ekosistem Hutan (PEH)	Akses jalan, pembangunan dan penerapan kebijakan.	keterbatasan dana, rendahnya kualitas SDM dan hal-hal terkait penerapan kebijakan yang sedang berlaku.	Tidak ada.	Memberikan dukungan.
3	Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) Wakil SEKJEN	Pengembangan, kemajuan & perbaikan kawasan Taman Nasional Baluran.	Kurangnya pemahaman dan pengetahuan pengunjung.	Memperluas informasi melalui digitalisasi.	Tidak ada.
4	Koordinator Polisi Hutan	Strategi pengembangan kawasan yang menyesuaikan kondisi Taman Nasional Baluran.	Peraturan terkait tindak pidana untuk masyarakat yang menyimpang dalam memanfaatkan potensi hutan.	Tidak ada.	Tidak ada.

5	Masyarakat Binaan	Pengembangan sarana dan prasarana dan perbaikan jalan terutama di sekitar Savana Bekol hingga Pantai Bama.	Pendanaan yang terbatas untuk pengembangan sarana dan prasarana Taman Nasional Baluran	Potensi perairan adanya perahu wisata, inventarisasi potensi, seperti mangrove, adanya pembatasan wilayah penelitian dan wisata, membuat papan peringatan dan papan informasi dalam bentuk narasi dan secara ilmiah serta menentukan titik berat peran Taman Nasional Baluran sebagai rekreasi dan penelitian.	Mengawal pengembangan SDA dan menata SDA dengan teratur (membuat rencana kegiatan pra, proses, dan post).
6	Masyarakat Peduli Api (MPA)	Perbaikan jalan menuju pantai bama di aspal dan wilayah Savana Bekol bertambah luas seperti penebangan replikasi ditebang.	Tidak ada.	Tidak pernah, karena bukan kapasitas seorang MPA.	Tidak ada.

Peran Masyarakat Terhadap Pengembangan Kawasan Taman Nasional Baluran, Situbondo, Jawa Timur

Tabel 2 menguraikan peran masyarakat dalam pengembangan kawasan Taman Nasional Baluran. Demikian menunjukkan gambaran keterlibatan masyarakat dalam pengembangan kawasan Taman Nasional Baluran, dimana tabel kedua, baik P3K manggala agni, PEH, P3K wakil SEKJEN, koordinator POLHUT, masyarakat binaan, MPA hingga penyuluh mengetahui pengembangan kawasan Taman Nasional Baluran, berupa pembangunan akses jalan yang lebih baik dari pintu masuk hingga Pantai Bama, pembangunan dengan desain bangunan yang lebih modern, penerapan kebijakan, sarana dan prasarana hingga strategi pengembangan guna kelangsungan kemajuan dan perbaikan kawasan Taman Nasional Baluran.

Pengembangan tersebut cenderung mengalami beberapa kendala, diantaranya yaitu keterbatasan dana, rendahnya kualitas sumber daya manusia, kerusakan pembangunan, baik disebabkan oleh ulah manusia maupun satwa liar hingga kurangnya pemahaman dan pengetahuan pengunjung akan Taman Nasional Baluran. Kendala juga ditemukan pada kebijakan yang berlaku, salah satunya adalah peraturan terkait tindak pidana untuk masyarakat yang menyimpang dalam memanfaatkan potensi hutan. Kendala tersebut tentunya dialami pada saat pembangunan dan pengembangan Taman Nasional Baluran hingga tentunya menimbulkan pro dan kontra. Meskipun demikian, pengembangan positif yang cenderung disetujui atau didukung berbagai pihak akan dilaksanakan untuk kemajuan kawasan Taman Nasional Baluran.

Tindakan pengembangan kawasan Taman Nasional Baluran yang dilakukan oleh masyarakat sekitar, yaitu membersihkan pohon atau ranting yang menutup akses jalan dan menjaga lingkungan. Hal tersebut seringkali dilakukan oleh masyarakat, dikarenakan kawasan Taman Nasional dipenuhi oleh pohon di pinggir akses jalan sehingga sering ditemukan ranting yang menutupi akses jalan. Selain itu, adanya pemberian dukungan antar masyarakat dengan peran yang berbeda diperlukan kerjasama yang baik untuk menanggulangi masalah pengembangan di Taman Nasional Baluran. Tindakan pengembangan kawasan Taman Nasional Baluran lainnya, yaitu mengawal pengembangan Sumber Daya Alam (SDA) dan menata SDA dengan teratur dengan membuat rencana kegiatan mulai dari sebelum dilakukannya rencana kegiatan, proses selama kegiatan berlangsung, dan setelah kegiatan dengan sistem pelaporan pengembangan tertentu.

Usulan pengembangan kawasan Taman Nasional Baluran yang diusulkan oleh masyarakat sekitar, yaitu perbaikan sinyal terkhusus di kawasan Pantai Bama, memperluas informasi melalui digitalisasi atau publikasi di media sosial yang dapat berpotensi untuk meningkatkan wisatawan atau pengunjung di TN. Baluran. Usulan lainnya untuk pengembangan TN. baluran seputar wisatawan, yaitu wisatawan harus dibatasi serta harga tiket masuk ditingkatkan nominalnya karena dapat mendukung tindakan pengembangan kawasan TN. Baluran.

Potensi perairan adanya perahu wisata, inventarisasi potensi, seperti mangrove, adanya pembatasan wilayah penelitian dan wisata, pengamanan pengunjung dari macaca, membuat papan peringatan terkait wilayah konservasi, membuat papan informasi tanaman, tempat, atau spot unik di sekitar Taman Nasional Baluran, seperti sumur tua dalam bentuk narasi, informasi secara ilmiah di setiap spot atau resort, serta menentukan titik berat peran baluran sebagai rekreasi dan penelitian. Aspek-aspek tersebut dapat dilakukan sesuai dengan usulan dari masyarakat sekitar Taman Nasional Baluran agar terciptanya kawasan yang lebih maju dan lebih baik.

KESIMPULAN

Masyarakat berperan aktif dalam upaya perlindungan dan pengembangan terhadap kawasan Taman Nasional Baluran karena setiap masyarakat dengan peran yang berbeda memiliki tugas dan kewajiban dapat menunjang tindakan perlindungan dan pengembangan sekitar kawasan. Selain itu, dengan adanya tugas dan kewajiban masyarakat yang beragam menjadikan masyarakat saling membantu antara satu sama lain baik sebagai P3K Manggala Agni, PEH, P3K Sekjen, Koordinator POLHUT, masyarakat binaan, MPA, dan penyuluh yang bertugas di setiap resort Taman Nasional Baluran. Perbedaan tugas tersebut menitikberatkan pada perlindungan kawasan yang diiringi dengan pengembangan kawasan Taman Nasional Baluran.

DAFTAR PUSTAKA

- Fandreawan, F., and Purwaningtyas, A. (2024). "Analisis Taman Nasional Baluran Kabupaten Situbondo Provinsi Jawa Timur Sebagai Destinasi Pariwisata Berkelanjutan." *Jurnal Manajemen Perhotelan dan Pariwisata* 7(1): 123–28. 10.23887/jmpp.v7i1.76848.
- Garsetiasih, R., Sawitri, R., and Rianti, A. 2016. *Bioekologi Dan Konservasi Banteng Di Indonesia*. Bogor: Forda Press.
- Hanim, L., Chalim, M. A., and Hafidz, J. (2020). "Pelaksanaan Perlindungan Satwa Liar Yang Dilindungi Menurut Hukum Indonesia Dan Hukum Internasional." *Prosiding Seminar Nasional Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat* 1(1): 161–68. 10.24967/psn.v1i1.819
- Garjita, I. P., Susilowati, I., and Soeprobowati T. R. 2014. "Strategi Pemberdayaan Masyarakat Kelompok Tani Hutan Ngudi Makmur Di Sekitar Kawasan Taman Nasional Gunung Merapi." *Jurnal Ekosains* 6(1). <https://api.semanticscholar.org/CorpusID:129719235>.
- Irawan, D. (2003). "Peran Serta Masyarakat Dalam Penyediaan Prasarana Perkotaan Melalui Community Contract Di Kota Pontianak." Universitas Diponegoro.

- Istomo and Hartarto, W. (2019). "Komposisi Jenis Dan Struktur Tegakan Berbagai Formasi Hutan Di Resort Bama Taman Nasional Baluran, Jawa Timur." *Journal of Tropical Silviculture* 10(2): 75–82. 10.29244/j-siltrop.10.2.75-82
- Kim H., Sefcik, S. C., and Bradway C. (2017). "Characteristics of Qualitative Descriptive Studies: A Systematic Review." *Research in Nursing and Health* 40(1): 23–42. 10.21061/jcte.v21i1.647
- Narsuka, Retnowati, D, Setiawan, B., and Cangkringan, K. (2016). "Persepsi Dan Peran Serta Masyarakat Lokal Dalam Pengelolaan Taman Nasional Gunung Merapi ." *Majalah Geografi Indonesia* 23(2): 90–108.
- Panuju, B. (1999). *Pengadaan Perumahan Kota Dengan Peran Serta Masyarakat Berpenghasilan Rendah. Bandung: Penerbit Alumni.*
- Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam.
- Putro, H. R., Supriatin, Sunkar, A., Rossanda, D., dan Prihatini, E. R. (2012). *Pengelolaan Kolaboratif Taman Nasional di Indonesia.* Bogor: IPB Press.
- Sawitri, R. dan Takandjandji, M. (2023). Penerbit BRIN *Sanctuarybanteng Di Taman Nasional Baluran. Dalam T. Atmoko, & H. Gunawan (Ed.), Mengenal Lebih Dekat Satwa Langka Indonesia Dan Memahami Pelestariannya (83–97).* Jakarta: Penerbit BRIN. 10.55981/brin.602.c620
- Sadono, Y. (2013). "Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Taman Nasional Gunung Merbabu Di Desa Jeruk Kecamatan Selo, Kabupaten Boyolali." *Jurnal Pembangunan Wilayah & Kota* 9(1): 53. 10.14710/pwk.v9i1.6526
- Soekmadi, R. (2003). "Pergeseran Paradigma Pengelolaan Kawasan Konservasi: Sebuah Wacana Baru Dalam Pengelolaan Kawasan Konservasi." *Jurnal Media Konservasi*, 8(3): 87–93.
- Wulandari, S. A., and Rohmah, A. N. (2023). "Pengembangan Ecotourism Taman Nasional Baluran Di Kabupaten Situbondo Melalui Edukasi Masyarakat Lokal." *Taawun* 3(01): 49–58. 10.37850/taawun.v3i01.410